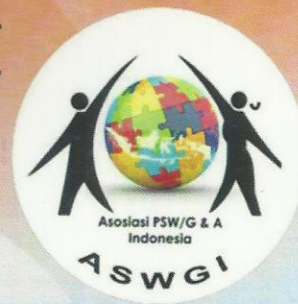




KONGRES I ASOSIASI PUSAT STUDI  
WANITA/GENDER DAN ANAK  
SE INDONESIA (ASWGI)



# PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL  
“PEREMPUAN MEMBANGUN BANGSA”



Kerjasama Perkumpulan Pusat Studi  
Gender Dan Anak Seluruh Indonesia  
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
dan Pusat Studi Gender dan Anak  
Universitas Airlangga Surabaya  
2015



Kerjasama Perkumpulan Pusat Studi Gender dan Anak Seluruh Indonesia dengan Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Pusat Studi Gender dan Anak – LPPM

Universitas Airlangga Surabaya

2015

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL

PEREMPUAN MEMBANGUN BANGSA

Tanggal 20 Agustus 2015

Di Kampus C Universitas Airlangga

Surabaya

Kerjasama Perkumpulan Pusat Studi Gender dan Anak Seluruh Indonesia dengan,  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Pusat Studi Gender dan Anak – LPPM

Universitas Airlangga Surabaya

2015

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL

PEREMPUAN MEMBANGUN BANGSA

Penyunting

Prof. Dr. Emy Susanti, MA ( Universitas Airlangga )

Sartika Soesilowati, MA.,PhD ( Universitas Airlangga)

Dr. Anis Farida, S.Sos,SH,M.Si ( Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)

Dr. Tuti Budirahayu, M.Si (Universitas Airlangga)

ISBN: 978-602-7037-3-8

## PRAKATA

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa prosiding Kongres dan Konferensi Nasional ke-1 Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak se Indonesia (ASWGI) dapat diterbitkan sesuai dengan rencana. Kongres dan Konferensi Nasional ASWGI ke-1 dengan tema “Perempuan Membangun Bangsa” ini dilaksanakan untuk menjadi ajang bagi PSW/G dan Program Studi Gender dan Anak seluruh Indonesia untuk saling bertemu dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian serta kajian yang telah dilakukan selama ini dalam bidang substansi/keilmuan Kajian Perempuan/Gender dan Anak. Konferensi mengambil momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengingatkan bahwa perempuan dan semua komponen bangsa sudah mengambil peran aktif dan harus terus mengambil peran yang lebih aktif lagi dalam membangun bangsa di masa-masa selanjutnya.

Hasil kongres dan konferensi yang salah satunya berupa prosiding kumpulan makalah hasil penelitian dari para peserta konferensi nasional ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai komunitas baik di lingkungan akademik (mahasiswa, aktifitas, dosen), praktisi, dan perencana serta pengambil kebijakan dan program yang relevan dengan persoalan perempuan, gender, anak, dan keluarga dari pendekatan yang holistik dan integratif. Adapun tema-tema yang diangkat pada Konferensi kali ini adalah tentang: (1) Perempuan, Kepemimpinan, dan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Gender, Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kreatif; (3) Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; (4) Gender, Seksualitas, dan Kesehatan; (5) Ketahanan, Keamanan, dan Perdamaian serta Prevensi-Intervensi Kekerasan Berbasis Gender; dan (6) Perlindungan Anak dan Remaja.

Seluruh artikel pada prosiding ini dipresentasikan dan dibahas pada Konferensi Nasional “Perempuan Membangun Bangsa” pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagai satu kesatuan rangkaian acara Kongres I ASWGI yang secara keseluruhan dimulai pada tanggal 19-21 Agustus 2015 di Surabaya melalui kerjasama antara Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Airlangga dan Asosiasi Pusat Studi Gender dan Anak Seluruh Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Nasional ini. Selain itu ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Ketua ASWGI Prof. Dr. Emy Susanti, MA, dan Tim Editor yang telah mengedit seluruh artikel sehingga terwujud prosiding ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan dalam upaya peningkatan harkat martabat kemanusiaan secara umum.

Surabaya, 19 Agustus 2015

Ketua Panitia,

Sartika Soesilowati, PhD



## **Sambutan Ketua Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Seluruh Indonesia**

Pertemuan Sinergitas Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak se Indonesia di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014 telah menjadi momen penting dalam mewujudkan gagasan pembentukan Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak se-Indonesia yang disingkat dengan sebutan ASWGI yang beranggotakan Pusat Studi dan Program Studi Wanita/Gender dan Anak dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia. Keberhasilan untuk meneguhkan eksistensi ASWGI dalam mewujudkan aspirasi tersebut memerlukan rangkaian pertemuan yang bertujuan untuk mengadopsi visi yang sejalan dengan visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesesuaian visi antara KPPPA dengan ASWGI, menjadi dasar pengembangan kemitraan antara kedua belah pihak. Keberhasilan untuk mewujudkan pusat studi wanita/gender dan anak seluruh Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan kepedulian yang sama terhadap masa depan perempuan dan anak-anak Indonesia. Dengan keberadaan ASWGI ini diharapkan dapat menjadi organisasi yang mandiri, profesional, berdaya dan berhasil guna dengan mewujudkan visi terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan gender serta perlindungan anak. Adapun misinya dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan berikut yaitu : Penguatan kelembagaan, (penguatan jejaring kelembagaan, kerjasama, kemitraan); Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan PSG/W dan Anak; Melakukan advokasi terhadap anak dan gender; Mengembangkan pengetahuan, kajian, advokasi serta publikasi ilmiah dalam issue gender & anak; Penguatan jejaring kemitraan di tingkat lokal, regional dan internasional; Mendorong kebijakan publik agar menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, anak dan kelompok marginal.

Penjabaran salah satu misi ASWGI dalam bentuk kegiatan Kongres ASWGI I dan Konferensi Nasional dengan tema “Perempuan Membangun Bangsa” yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 19-21 Agustus 2015 merupakan penanda kelahiran ASWGI yang bertujuan melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas PSG/W dan Anak di masing-masing perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pemilihan waktu kegiatan yang berdekatan dengan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia, mempunyai makna yang mendalam, yaitu untuk menyadarkan bahwa masih banyak “ketidakmerdekaan” yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di Indonesia. Tugas mulia bagi Asosiasi untuk dapat menjadi ujung tombak dalam hal pemikiran dan tindakan untuk mengupayakan kemerdekaan bagi para perempuan dan anak-anak yang masih hidup dalam penindasan dan ketidakamanan.

Satu hal mendasar yang perlu ditegaskan bahwa kegiatan Kongres ASWGI I dan Konferensi Nasional ini dapat terselenggara karena adanya kebutuhan yang besar dari masing-masing PSG/W dan Anak di Indonesia untuk berjejaring dan saling mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Tanpa adanya kesadaran dan dukungan dari berbagai pusat studi wanita/gender dan anak yang ada di Indonesia untuk bersedia hadir dalam kegiatan Kongres ASWGI I dan Konferensi Nasional, maka kelahiran ASWGI tidak mempunyai makna. Namun dengan antusiasme yang ditunjukkan oleh kehadiran pusat studi wanita/gender

dan anak dari Sabang sampai Merauke, menjadi bukti nyata bahwa ASWGI dibutuhkan dan diharapkan keberadaannya. Keberadaan ASWGI juga sangat diharapkan oleh KPPPA untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dukungan penuh KPPPA terhadap terbentuknya ASWGI telah sejak awal mula ditunjukkan dengan adanya perhatian, fasilitas dan dukungan. Kenyataan ini hendaknya diapresiasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk selalu menjaga komitmen menjalankan visi misi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua ASWGI terpilih untuk periode pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan Kongres dan Konferensi ini. Secara khusus, pertama ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ibu Menteri KPPPA beserta jajarannya yang dengan penuh semangat memfasilitasi terselenggaranya kegiatan kongres ASWGI I dan Konferensi Nasional dengan tema "Perempuan Membangun Bangsa". Kedua, kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, Pusat Studi Gender dan Anak - LPPM Universitas Airlangga, yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Ketiga, kepada panitia SC yang telah membidani lahirnya kegiatan Kongres dan Konferensi Nasional ini, panitia OC yang telah bekerja keras dengan segala daya dan upaya, dan secara khusus ucapan terima kasih kepada tim editor yang telah mengupayakan artikel yang masuk dapat diterbitkan dalam prosiding. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat dalam menginspirasi gerak langkah perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Surabaya, 19 Agustus 2015

Ketua ASWGI

Prof. Dr. Emy Susanti, M.A.



## **DAFTAR ISI**

### **A. Perempuan, Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan**

1. **Asosiasi Studi Wanita di Indonesia; Mewujudkan Pengakuan Keilmuan Studi Wanita**  
Hesty R. Wijaya
2. **Keterlibatan dan Kemenangan Kandidat Perempuan dalam Pemilihan Langsung Wali Nagari (Pilwara) di Sumatera Barat**  
Jendrius
3. **Kontestasi Perempuan Jawa Deli (Jadel) dalam Struktur Masyarakat Patriarki di Deli Sumatera Utara**  
Leylia Khairani
4. **Fenomena Politisi Artis, Gender dan Media**  
Netty Dyah Kurniasari

### **B. Gender, Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kreatif**

1. **Strategi Pengembangan Profesionalitas dalam Menangani BMI (BURUH MIGRAN INTERNASIONAL) Perempuan ke Hongkong**  
Hesti R. Wijaya  
Keppi Sukesi
2. **Wanita Minahasa dari aspek Historis, Mobilitas dan Dunia Kerja**  
Maria Heny Pratiknjo
3. **Strategi Kerjasama Indonesia – Hongkong Terkait Implementasi Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Wanita Tahun 2007**  
Henny Rosalinda
4. **Peran Perempuan dalam Pengembangan Industri Kerajinan Bordir sebagai Industri Kreatif untuk Pasar MEA**  
Mamik Indaryani

5. **Tantangan dan Harapan Kaum Perempuan dalam Meningkatkan Usaha Waralaba di Kota Manado**  
Ruth S. Umbase
6. **Komitmen Peran Sebagai Upaya Mencapai Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Ibu Bekerja (Tinjauan Teori Gender)**  
Padmi Dhyah Yulianti  
Arri Handayani
7. **Kesenjangan Gender Bidang Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah**  
Sulistiyan  
Wilujeng Roesalli  
Martini

### **C. Gender, Seksualitas dan Kesehatan**

1. **Analisis Pengetahuan tentang Hubungan Gizi dengan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Berbasis Gender**  
  
Esi Amilia  
  
Meuthia Fadilla  
  
Dwi Diar Estelitta
2. **Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Kaum Perempuan di Kawasan Sebangau, Kalimantan Tengah untuk Meningkatkan Kesehatan Keluarga Melalui Pengelolaan Lingkungan**  
  
Evi Feronika
3. **Sangkan Paraning “ Suami Kepala Rumah Tangga” dan Realisasinya dalam Keimanan Kristen dalam Perjanjian Lama Kitab Ester**  
  
Hesti R.Wijaya
4. **Analisis Gender dan Kemiskinan serta Faktor yang Mempengaruhinya**  
Muryani



5. Keterlibatan Sektor Rumah Tangga dan Tenaga Pendidik dalam Mengurangi Ketimpangan Gender : Kendala dan Tantangan  
Nursini
6. Perempuan-Perempuan Down Syndrom di Perbukitan Kapur Ponorogo (Studi tentang Ketahanan Keluarga Difabel dalam Perspektif Gender)  
Rina Heryanti
7. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Indonesia :Penyebab dan Upaya Penurunannya  
Yenina Akmal

#### **D. Ketahanan-Keamanan, Perdamaian dan Prevensi-Intervensi Kekerasan berbasis Gender**

1. Gender Development Index (GDI) dan Ketimpangan Gender di Sulawesi Tengah  
Andi Fatmawati Saloko  
Hafsah  
Halwiah
2. Melibatkan Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Peran Strategis PKK Malinau, Kalimantan Utara  
Milka Parung Rante Allo
3. Pengalaman Perempuan Korban “Marital Rape” (Studi Ketidaksetaraan Perempuan Dalam Konteks KDRT)  
Vinita Susanti
4. Strategi Keadilan dan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau  
Achmad Hidir  
Hesti Asriwandari  
Nur Laila Meilani

## **E. Perlindungan Anak dan Remaja**

1. **Sebuah Upaya Revitalisasi Perlindungan Anak dan Remaja oleh Komunitas Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH)**  
Ikhlasih Dalimoenthe
2. **Penanganan Penyalahgunaan Seksual Pada Anak dalam Konteks Keluarga Berdasarkan Manual yang ditulis Kathleen Coulborn Faller**  
Kristi E Poerwandari
3. **Upaya Pencegahan kekerasan Seksual Remaja melalui Edukasi dengan Media Bookled**  
Mutimmatul Faidah
4. **Perlindungan Anak Melalui Model Pengembangan Kelurahan Layak Anak**  
Titik Sumarti
5. **Kekerasan di Sekolah**  
Tuti Budirahayu
6. **Urgensi Literasi Media untuk Remaja sebagai Panduan Mengkritisi Media Sosial**  
Yuni Retnowati
7. **Penanganan Perempuan dan Anak Korban Trafficking di Industri Seksual Komersial**  
Bagong Suyanto
8. **Perangkulun: Sebuah Upaya Rekonsiliasi antara Pekerja Anak dan Majikan**  
Yohanes Sutanto  
Dyahni Ardrawersti

## **F. Peran Perempuan dalam Pembangunan**

1. **Kemandirian Lokal : Strategi Perempuan Lereng Gunung Wilis dalam Penanggulangan Kemiskinan**  
Anis Farida
2. **Analisis Partisipasi Wanita di Era Otonomi Daerah pada Musyawarah Rencana Pembangunan di Tiga Strata Masyarakat Kabupaten di Lamongan**  
Nugrahini SW



**3. Perubahan Pola Adaptasi Wanita Pedesaan Di Desa Pariwisata Wanurejo**

Sri Hilmi Pujihartati

Suyatmi

**4. Menuju Penguatan Peran Publik Perempuan di Kabupaten Lebak**

Sriwulan Ferindian F

Titik Sumarti

Ikeu Tanziha

**5. Profesi Perempuan dalam Al Qur'an : Perenungan Reorientasi Profesi dalam Mendukung Ekonomi Keluarga di Era Reformasi**

Hamzah

**6. Perempuan dan Kedudukannya dalam Susastra Hindu**

Luh Apriani

**7. Local Genius dan Implementasi Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten di Sumatera Utara**

T. Irmayani

Nurbani

Sabariah Bangun

## PARTISIPASI LAKI-LAKI UNTUK PENGUATAN PERAN PUBLIK PEREMPUAN DI KABUPATEN LEBAK

Titik Sumarti<sup>1</sup>, Sriwulan Ferindian Falatehan<sup>2</sup>, dan Asri Sulistiawati<sup>3</sup>

### Abstrak

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan adanya kewajiban Desa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Meski begitu masih didapati adanya kesenjangan kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari sebesar 7,12 persen antara IPM dan IDG Kabupaten Lebak, Banten di tahun 2012. Masih senjangnya manfaat pembangunan yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki termasuk di desa, salah satunya terlihat dari peran publik perempuan. Untuk melihat hal tersebut dipilih dengan pendekatan bagaimana partisipasi laki-laki dalam mendukung partisipasi perempuan dalam peran publik pada program penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Kencana dan Bulakan, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, tahun 2015. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, studi literatur, dan *Focus Group Discussion*. Hasil menunjukkan perempuan di Gunung Kencana memiliki **posisi dalam struktur kelembagaan program pembangunan** lebih baik dibandingkan di Bulakan. Partisipasi laki-laki yang dilihat dari **subyektivitas laki-laki** yang lebih positif di Gunung Kencana dibandingkan Bulakan dalam mendukung partisipasi perempuan pada program pembangunan dipengaruhi oleh komponen pengetahuan, sikap dan perilakunya. Dalam **relasi gender dalam keluarga** ditemukan adanya pembagian kerja yang tidak setara yang lebih banyak didominasi oleh perempuan pada sektor domestik membatasi gerak dalam konteks komunitas. Ketiga faktor yang dipaparkan di atas membentuk model sinergitas laki-laki dan perempuan yang jika positif, akan semakin menguatkan peran publik perempuan dalam pembangunan di desa.

Kata Kunci: Partisipasi, Subyektivitas laki-laki, Relasi Gender dalam Keluarga, dan Posisi dalam Struktur Kelembagaan

### BAB I. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa salah satu isu strategis berkenaan dengan pengarusutamaan gender (PUG) antara lain meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010 menunjukkan adanya fakta bahwa kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan manusia di Indonesia semakin meningkat yang terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengalami peningkatan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2010 IPM meningkat dari 72,3 persen pada tahun 2010 menjadi 73,8 persen pada tahun 2013, dan IPG meningkat dari 67,2 persen menjadi 69,6 persen. Indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan

<sup>1</sup> Pusat Kajian Gender dan Anak, Institut Pertanian Bogor  
[titiksumarti61@gmail.com](mailto:titiksumarti61@gmail.com)

<sup>2</sup> [sriwulanferindian@gmail.com](mailto:sriwulanferindian@gmail.com)

<sup>3</sup> [asrisulistya@gmail.com](mailto:asrisulistya@gmail.com)



peran perempuan dalam pembangunan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang pada tahun 2013 meningkat menjadi 70,5.

Dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Data yang diambil dari laporan BPS tahun 2012 ini menunjukkan, di bidang pendidikan, kesenjangan Angka Melek Huruf (AMH) antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil, yaitu dari 5,13 persen pada tahun 2010 menjadi 5,11 persen pada tahun 2012. Adapun di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan meningkat dari 71,47 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,69 tahun pada tahun 2012. Di bidang ekonomi, rasio upah perempuan terhadap laki-laki sedikit meningkat dari 0,79 persen pada tahun 2010 menjadi 0,80 persen pada tahun 2012. Sehubungan dengan sejumlah fakta di atas, meski data menunjukkan adanya peningkatan baik IPM, IPG maupun IDG, namun demikian data tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan khususnya dalam hal partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tidak adanya peningkatan yang signifikan ini, ditandai dengan peningkatan persentase masih berada pada kisaran 0,01 sampai dua persen.

Persoalan lain yang dihadapi oleh perempuan pedesaan adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan Musyawarah Desa. Berbagai studi mengungkapkan persentase perempuan di dalam Musrenbangdes (musyawarah perencanaan dan pengembangan desa) tidak pernah lebih dari 20%, kecuali di Aceh dengan adanya Musrenbangdes khusus perempuan. Secara kuantitatif, forum Musrenbangdes tidak menjadikan keterwakilan perempuan sebagai prasyarat partisipasi.

Sudah banyak regulasi yang mengatur tentang partisipasi perempuan di pembangunan. UU No. 7 Tahun 1984, pasal 14 menyebutkan bahwa Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh wanita di daerah pedesaan dan peranan penting yang dimainkan wanita pedesaan dalam kelangsungan hidup mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan konvensi ini. Pemerintah pusat melalui Inpres 9 Tahun 2000 telah memberikan instruksi kepada semua pemangku kepentingan di pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.

Disamping itu, dengan diundangkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, maka pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah pada masyarakat pedesaan termasuk perempuan dan anak sebagai obyek dan subyek pembangunan yang berperan secara aktif dalam peran publiknya. Upaya yang dapat mengakomodir partisipasi perempuan di desa salah satunya dengan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 58). Bahkan dalam PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa Pasal 72 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan



secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Sedangkan Pasal 80 menyebutkan bahwa Musyawarah desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat termasuk didalamnya adalah perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Dengan adanya UU Desa, pemerintahan Desa wajib berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa. Kondisi ini menuntut perempuan untuk bisa berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan-penguatan peran perempuan dalam proses Musrenbang maupun kepemimpinan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana partisipasi perempuan di pedesaan dalam proses pembangunan di desa yang kemudian ditentukan dilakukan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lebak dipilih dengan pertimbangan masih adanya peningkatan IPM, IPG, dan IDG namun masih ditemui kesenjangan antara IPM dan IDG yang cukup besar, yaitu 7,12 persen. IPM, IPG, dan IDG Kabupaten Lebak pada tahun 2012 sebesar 68,43 persen menunjukkan adanya peningkatan dari IPM tahun 2011 yang sebesar 67,98 persen pada Tahun 2012. IPG meningkat dari 60,92 persen pada tahun 2011 menjadi 61,31 pada tahun 2012, dan IDG meningkat dari 59,50 persen pada tahun 2011 menjadi 63,09 persen pada Tahun 2012. Dari kesenjangan antara nilai IPM dan IDG di tahun 2012 sebesar 7,12 persen memperlihatkan masih senjangnya manfaat pembangunan yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki di Kabupaten Lebak. (Pembangunan Manusia Berbasis Gender, KPP-PA, 2013). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lebak Tahun 2011 mengalami penurunan bila dibanding Tahun 2010. AKI Kabupaten Lebak Tahun 2010 sebesar 197,33 per 100.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 196,96 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2011. (RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2013). Meskipun terjadi penurunan AKI di Tahun 2011, namun AKI di Kabupaten Lebak tergolong masih tinggi. Seperti yang dilansir Ketua Ikatan Bidan Indonesia, AKI di Kabupaten Lebak cukup tinggi dan tergolong pada kategori hitam kasus AKI. Bentuk kemiskinan tampak dari banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari kabupaten ini dimana periode Januari – Mei 2014 tercatat sebanyak tercatat 238 orang dan sekitar 80 persen pendidikan mereka rata-rata SD dan datang dari pelosok desa. Dari 238 TKI, sebanyak 161 perempuan dan 77 laki-laki. (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak, 2014). Dengan kondisi tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis partisipasi laki-laki dalam mendukung perempuan pedesaan dalam program pemberdayaan masyarakat (bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan
2. Merumuskan rekomendasi model sinergitas laki-laki dan perempuan pedesaan dalam program pemberdayaan masyarakat desa.



## BAB II. TELAAH PUSTAKA

### 2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara luas diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pembangunan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. menurut Nasdian (2013) persoalan ketidakberdayaan masyarakat bawah biasanya berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan, keterbelakangan, kekurangan kapasitas pendidikan. Salah satu prinsip pembangunan yang dianggap penting dan bisa menjembatani proses pemberdayaan komunitas adalah *grass root development* (pembangunan dimulai dari rakyat).

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan suatu yang harus ditumbuhkembangkan namun pada realitanya tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengharuskan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif (Nasution, 2009).

### 2.2 Partisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam lingkup pengembangan masyarakat, maka bagaimana anggota masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, dapat dilihat dari proses tahapan pembangunan, yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat.
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Studi *knowledge* (pengetahuan), *attitude* (sikap), and *practice* (perilaku) atau disingkat sebagai KAP merupakan suatu studi representatif dari suatu populasi yang bersifat spesifik dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang diketahui, dipercayai, dan dilakukan terkait



dengan suatu topik tertentu (WHO 2008). Konsep KAP digunakan untuk melihat isu-isu strategis yang berkembang pada masyarakat khususnya berkaitan dengan partisipasi laki-laki yang tercermin dari pengetahuan, sikap, dan perilakunya dalam mendukung partisipasi perempuan dalam program pembangunan.

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Kajian “Partisipasi Perempuan Pedesaan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan” dilaksanakan pada Maret sampai April 2015 di Desa Gunung Kencana dan Bulakan, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemilihan kecamatan berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (BPPKB) daerah mana yang dapat mewakili sebagai daerah kemiskinan tinggi. Pemilihan desa kemudian dilakukan dengan melihat karakteristik desa yang dapat mewakili tipologi desa yang partisipasi perempuan dalam musrenbang tinggi dan desa dipilih yang partisipasi perempuan dalam musrenbang rendah.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mendukung temuan hasil penelitian, dilakukan juga analisa atas data sekunder untuk memperkaya hasil penelitian.

#### **3.3 Penentuan Informan dan Responden**

Responden dalam kajian ini sebanyak 7 responden di masing – masing desa. Responden terdiri dari perempuan yang aktif di Musrenbang, laki – laki yang aktif di Musrenbang, dan perempuan yang tidak aktif di Musrenbang. Pihak – pihak yang aktif dalam Musrenbang adalah orang yang menduduki jabatan sebagai ketua atau kader di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan *workshop*.

##### **a. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam dilakukan pada responden terpilih dengan menggunakan panduan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses dan latar belakang keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat.

##### **b. Focus Group Discussion (FGD)**

FGD dilakukan untuk mengetahui masalah, potensi, kebutuhan dan peran masing – masing pihak untuk mendorong partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat. FGD dilakukan sebanyak 3 kali di setiap desa, yaitu:

##### **a. FGD pada kelompok perempuan dengan melibatkan 10 orang**



- b. FGD pada kelompok laki – laki dengan melibatkan 10 orang
- c. FGD dengan melibatkan kelompok perempuan dan laki – laki masing – masing 5 orang
- c. *Workshop*  
Hasil penelitian lapang dipaparkan pada stakeholder dari dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Pertanian, Perindustrian, Kehutanan, Bappeda, dan Badan Pemberdayaan Keluarga. Masukan dan pandangan dari tiap stakeholder atas temuan lapang ditujukan untuk merumuskan model sinergitas laki-laki dan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat.

### **3.6 Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan atas catatan lapang yang dihasilkan oleh peneliti dari pengambilan data maupun analisis atas literatur sekunder yang menunjang hasil temuan.

## **BAB IV. PERBANDINGAN KONDISI SOSIAL DAN KELEMBAGAAN DI LOKASI PENELITIAN<sup>4</sup>**

### **4.1. Kondisi Sosial**

Desa Gunung Kencana dan Desa Bulakan merupakan desa yang berada di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Desa Gunung Kencana memiliki luas wilayah sebesar 1.450 hektar dan lebih luas bila dibandingkan Desa Bulakan yang luasnya 1.313 hektar. Sebagai desa yang merupakan ibukota kecamatan, Desa Gunung Kencana jauh lebih dekat dengan kecamatan bila dibandingkan Desa Bulakan yang mencapai 27 km, jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 69 kilo meter.

Tidak banyak perbedaan jumlah penduduk di kedua desa dimana di Desa Gunung Kencana pada tahun 2014 sebesar 3.107 jiwa yang terdiri dari 1.628 jiwa penduduk laki-laki dan 1.479 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 2.49 jiwa/Km<sup>2</sup> sementara di Desa Bulakan pada tahun 2014 jumlah penduduknya sebesar 3.054 jiwa yang terdiri dari 1.581 jiwa penduduk laki-laki dan 1.473 penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 2.30 jiwa/Km<sup>2</sup>. Berdasarkan kepadatan penduduknya, penduduk di Desa Gunung Kencana lebih padat jika dibandingkan dengan Desa Bulakan.

Penduduk di Desa Gunung Kencana berdasarkan tingkat kesejahterannya di Tahun 2014 terdiri dari: Pra KS sebanyak 145 jiwa, KS I sebanyak 231 jiwa, KS II sebanyak 489 jiwa, KS III sebanyak 138 jiwa dan KS3+ sebanyak 21 jiwa. Adapun penduduk di Desa Bulakan yang tergolong Pra KS sebanyak 146 jiwa, KS I sebanyak 157 jiwa, KS II sebanyak 271 jiwa, KS III sebanyak 164 jiwa dan KS3+ sebanyak 5 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Gunung Kencana

<sup>4</sup> Data disadur dari Publikasi BPS "Kecamatan Gunung Kencana dalam Angka Tahun 2014"



relatif lebih miskin dibandingkan Desa Bulakan, dan ketimpangan antara keluarga miskin dan kaya lebih tajam.

Berdasarkan mata pencahariannya, di tahun 2014 ciri agraris bukan sawah tampak dengan masih banyaknya penduduk yang menjadi petani namun jumlah butuh tani di Bulakan (312 jiwa) lebih banyak dibandingkan di Gunung Kencana (142 jiwa). Penduduk yang lainya banyak mengisi di sektor perdagangan, karyawan perkebunan, PNS atau menjadi TKI. TKI dari Desa Bulakan (38 orang) lebih banyak dibandingkan Gunung Kencana (3 orang).

Di Tahun 2014, fasilitas kesehatan Puskesmas di Gunung Kencana namun hanya Praktek Bidan di Bulakan. Hal ini menjadikan ketersediaan layanan kesehatan di Desa Gunung Kencana tampak lebih maju dibandingkan di Bulakan, yang terlihat adanya satu orang dokter, satu orang bidan, dan empat orang paramedis di Gunung Kencana sedangkan Desa Bulakan tidak memiliki dokter dan paramedis, hanya memiliki 2 orang bidan. Meski begitu di masing-masing desa masih ditemui tenaga kesehatan tradisonal yaitu empat orang paraji dan satu orang paraji terlatih. Ibu melahirkan di Desa Gunung Kencana (68 orang) pada tahun 2014 lebih banyak dibandingkan di Desa Bulakan (51 orang). Meski begitu, masih ditemui adanya kematian Ibu di Desa Gunung Kencana sebanyak 2 orang yaitu pada saat nifas.

Desa Gunung Kencana di tahun 2014 memiliki enam posyandu, yang memiliki 30 kader posyandu aktif, sedangkan Desa Bulakan juga memiliki enam posyandu dan 30 kader posyandu aktif. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Gunung Kencana yaitu satu buah Puskesmas/Pustu, dan satu buah Poltek dan Bidan. Penderita gizi kurang di Desa Gunung Kencana di Tahun 2014 sebanyak delapan orang dan tidak terdapat penderita gizi buruk. Adapun di Desa Bulakan, jumlah penderita gizi kurang sebanyak delapan orang dan terdapat satu orang penderita gizi buruk.

Untuk fasilitas pendidikan, Desa Gunung Kencana tampak lebih majun dengan telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 TK swasta, 2 buah SD/MI negeri, 2 buah SLTP (1 SLTP negeri dan 1 SLTP swasta), dan 1 buah SMA/MA swasta sementara di Desa Bulakan memiliki 2 buah SD/MI negeri, 1 buah SLTP negeri, dan baru memiliki SMA selama dua tahun terakhir namun belum memiliki PAUD/TK.

#### **4.2. Kelembagaan**

Selain Pemerintah Desa, terdapat lembaga-lembaga masyarakat diantaranya BPD, LPM, PKK, Posyandu untuk menjalankan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tampak bahwa di Desa Gunung Kencana partisipasi perempuan di struktur pemerintahan lebih banyak dibandingkan di Bulakan. Lembaga-lembaga desa tersebut dibutuhkan untuk penyusunan RPJM Desa.



**Tabel 1. Partisipasi Perempuan pada Lembaga Politik Desa Gunung Kencana dan Bulakan**

No	Uraian	Gunung Kencana	Bulakan
1	Pengurus Pemerintah Desa	30% Perempuan	22% Perempuan
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	14% Perempuan	Tidak ada perempuan
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	15% Perempuan	Tidak ada perempuan

Sumber : Profil desa tahun 2015

Dalam tahapan penyusunan RPJM Desa, dimulai dengan Sosialisasi kepada masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengundang berbagai unsur masyarakat di antara BPD, LKMD, PKK, Pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga miskin, unsur perempuan serta kelompok ekonomi yang ada di desa. Dalam Sosialisasi ini dibentuk Pokja perencanaan yang nantinya pokja ini yang akan menjalankan secara langsung proses-proses dalam penyusunan RPJM Desa. Pokja terdiri dari berbagai unsur seperti BPD, Pemdes, LKMD, Pemuda, Perempuan, warga miskin dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya Musyawarah Desa (Musdes), dimana di dalamnya melibatkan masyarakat secara langsung antara lain dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan warga miskin, pemerhati anak, kelompok ekonomi, dan pemuda.

PNPM di Desa Gunung Kencana maupun Bulakan menjadi salah satu program terdiri dari ketua yaitu laki-laki, sekertaris dan bendahara yaitu perempuan, sedangkan kedua anggotanya terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pada awalnya PNPM ini bergerak dalam dua program yaitu Fisik dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP). Namun karena kemudian yang lebih berjalan sampai dengan saat ini adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih meminati program SPP yang dianggap lebih mensejahterakan masyarakat Gunung Kencana jika dibandingkan dengan program fisik. Karena itulah program tersebut sampai dengan sekarang masih berjalan.

## **BAB V. RELASI KELUARGA DI DESA GUNUNGKENCANA DAN DESA BULAKAN**

Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan dapat terjadi dengan latar belakang adanya suatu relasi keluarga dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga baik untuk sektor reproduktif dan produktif.

### **5.1. Pembagian Kerja Reproduksi**

Sebagaimana terlihat hasil FGD pada Tabel 2 sebagian besar aktivitas domestik dilakukan bersama oleh laki-laki maupun perempuan sehingga dapat dikatakan sudah berwawasan gender. Peran-peran dalam keluarga tidak seluruhnya kaku sebagai peran ibu, ayah, anak laki-laki, atau anak perempuan saja, tetapi ada beberapa tugas/peran yang dapat dipertukarkan.



Pandangan bahwa suami merupakan pencari nafkah utama sehingga istri berkewajiban menjalankan pekerjaan domestik, tidak berlaku pada kedua desa. Meski secara kuantitas (jumlah jam kerja) perempuan berperan lebih banyak, namun laki-laki tidak jarang dan tidak segan membantu istri dalam menjalankan kegiatan domestik.

**Tabel 2. Pembagian Kerja Reproduksi Rumahtangga di Desa Gunung Kencana dan Desa Bulakan**

No	Aktivitas Reproduksi	Gunung Kencana			Bulakan		
		L	B	P	L	B	P
1	Menyapu		√			√	
2	Mengepel			√			√
3	Mencuci piring		√			√	
4	Mencuci Pakaian		√			√	
5	Menjemur		√			√	
6	Menyetrika			√			√
7	Mengasuh anak		√			√	
8	Memasak		√			√	
9	Menyiapkan makanan		√			√	
10	Memasang tabung gas		√			√	
11	Memperbaiki rumah	√			√		

Ket: L=Laki-laki; B=Bersama; P=Perempuan

## 5.2. Profil Pembagian Kerja Produktif

Pembagian kerja produktif dibedakan atas empat sektor yang teridentifikasi dari hasil FGD antara lain, pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor formal seperti honorer. Pada sektor perkebunan, komoditi utama di Desa Gunung Kencana antara lain karet dan cengkih. Sementara Desa Bulakan, selain kedua komoditi tersebut, juga menghasilkan kelapa sawit.

**Tabel 3. Pembagian Kerja Produktif Desa Gunung Kencana dan Desa Bulakan**

No	Aktivitas Reproduksi	Gunung Kencana			Bulakan		
		L	B	P	L	B	P
<b>1</b>	<b>Bidang Pertanian</b>						
	- Tandur			√		√	
	- Menanam			√		√	
	- Nyangkul		√			√	
	- Panen		√			√	
	- Mengangkat hasil	√			√		
	- Menjual	√				√	
	- Menikmati hasil		√			√	
<b>2</b>	<b>Perkebunan</b>						
	- Nyadap karet		√			√	
	- Mengambil hasil sadapan					√	
	- Pemupukan	√				√	
	- Pengambilan cengkeh	√				√	
	- Pemilahan cengkeh			√		√	
	- Menampung Sawit	-	-	-	√		
	- Jual Beli Sawit	-	-	-	√		



No	Aktivitas Reproduksi	Gunung Kencana			Bulakan		
		L	B	P	L	B	P
3	<b>Perikanan</b>						
	Budidaya	-	-	-	√		
	Pemberian pakan	-	-	-		√	
	Perawatan	-	-	-		√	
	Panen	-	-	-		√	
4	<b>Sektor Formal (Honorar)</b>						
	Guru		√			√	
	Puskesmas		√		-	-	-
	Perangkat Desa		√			√	
	Perangkat Kecamatan		√		-	-	-

Ket: L=Laki-laki; B=Bersama; P=Perempuan

Terlihat bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempati sejumlah sektor produktif di kedua desa. Pada sektor pertanian, spesialisasi pekerjaan menurut jenis kelamin lebih nampak di Desa Gunung Kencana dibandingkan dengan Desa Bulakan. Pekerjaan seperti menandur dan menanam secara spesifik merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Adapun pekerjaan seperti mengangkat hasil dan menjual hasil panen merupakan tugas laki-laki. Namun tidak demikian halnya dengan Desa Bulakan dimana pada desa ini pembagian kerja tidak diperuntukan untuk laki-laki saja maupun perempuan saja melainkan dapat dilakukan oleh keduanya. Di Desa Bulakan menunjukan hampir seluruh tugas dan pekerjaan dapat dilakukan oleh laki-laki-maupun perempuan secara bersamaan. Hal ini berhubungan dengan fakta bahwa di Desa Bulakan, perempuan ikut mendampingi suami di setiap tugas dan pekerjaan. Dengan kata lain, perempuan belum dianggap sebagai pekerja produktif namun pekerjaannya dianggap hanya 'membantu' suami. Demikian halnya dengan sektor perkebunan dan perikanan.

## BAB VI. POSISI PEREMPUAN DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Perempuan di Desa Gunung Kencana lebih memiliki figur perempuan dalam peran publik di struktur kelembagaan dalam program pembangunan karena Kepala Desa mereka yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan di Desa Bulakan yang menjabat sebagai Ketua program Posyandu. Meski begitu dalam ruang partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang mengorganisir usulan program di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat (lebih banyak yang merupakan laki-laki) telah berupaya memenuhi jumlah kuota 30 persen perempuan untuk mengikuti musrenbangdes tersebut. Perempuan di Gunung Kencana dari organisasi yang mewakili kebutuhan perempuan dalam ketiga bidang tersebut, seperti PKK, Posyandu, dan PAUD banyak yang menghadiri kegiatan tersebut lebih



dulu dibandingkan perempuan di Bulakan yang baru sekitar setahun ini dilibatkan.

Di Desa Gunung Kencana kondisi pengajuan usulan program dari bidang kesehatan dan pendidikan, yang berupa pendirian Posyandu dan PAUD, masih menunggu hasil dari kecamatan mengenai hasil persetujuan atas pengajuan tersebut sementara itu di Desa Bulakan menunggu tindak lanjut dari SKPD terkait yaitu Dinas kesehatan dan Pendidikan atas usulan program di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan posisi perempuan di Gunung Kencana lebih cukup kuat dibandingkan di Bulakan dalam menggawangi aspirasinya pada tahap perencanaan karena tidak jarang laki-laki akan melobi perempuan agar setuju dalam meloloskan pembangunan jalan lingkungan sebagai usulan program yang diprioritaskan oleh desa dan merelakan usulan kebutuhan mereka tidak dilaksanakan. Sementara partisipasi perempuan di Bulakan ketika tahap perencanaan hanya pada aksesnya saja karena tidak dapat mengontrol untuk diluluskan sebagai program desa.

Sementara itu pada musyawarah desa untuk program ekonomi berupa proram SPP dari PNPM di kedua desa dimana ketuanya perempuan, perempuan terlihat tampak lebih banyak memperoleh ruang, yaitu sejak perencanaan mengenai besarnya pinjaman maupun jumlah penerima, pelaksanaan program, memperoleh manfaat hingga mengevaluasinya.

## **BAB VII. PARTISIPASI LAKI-LAKI DALAM MENDUKUNG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERAN PUBLIK**

Berikut ini adalah gambaran mengenai partisipasi laki-laki dalam mendukung partisipasi perempuan dalam peran publik di tiap desa.

### **Desa Gunung Kencana**

Fakta menarik ditemukan bahwa laki-laki di desa ini menganggap bahwa perempuan dapat dipercaya, aktif, pintar bernegosiasi, dan lebih berkomitmen dalam menjalankan organisasi. Mereka melihat perempuan di desa mereka lebih antusias untuk datang tepat waktu bahkan seringkali datang sebelum waktu yang dijadwalkan. Tidak hanya hadir, perempuan juga secara terbuka dapat menyuarakan pendapatnya.

Dengan potensinya tersebut, laki-laki memiliki kecenderungan untuk mengajak perempuan dalam pengelolaan program. Bahkan dalam beberapa kesempatan di kegiatan musrenbangdes, laki-laki lebih memilih menyampaikan usulannya lewat perempuan dengan 'membisikkan' usulannya, untuk kemudian perempuan yang menyampaikannya di forum. Hal ini dilakukan karena perempuan selain dianggap lebih 'vokal' juga dipandang lebih 'pintar' dalam bernegosiasi serta dapat mempertahankan pendapatnya dibandingkan laki-laki. Tidak heran jika dalam kegiatan kecamatan pun, peserta perempuan paling banyak dipastikan berasal dari Desa Gunung Kencana termasuk dalam kegiatan musrenbang tingkat



kecamatan. Dapat dikatakan bahwa besarnya antusiasme perempuan yang ditunjang oleh dukungan penuh suami menjadikan partisipasi perempuan di Desa Gunung Kencana tergolong tinggi dibandingkan dengan Desa Bulakan yang cenderung masih membatasi ruang gerak perempuan.

### **Desa Bulakan**

Bentuk partisipasi laki-laki dalam mendukung perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Bulakan ditandai dengan adanya pandangan mengecilkan tentang peran perempuan di tingkat desa meski banyak memiliki peran dalam ekonomi rumah tangga, dan perempuan terlihat kurang memiliki kapasitas untuk berkontribusi di tingkat desa. Laki-laki nampak kurang setuju atas partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan di tingkat desa. Oleh karena itu perempuan kurang diberi ruang dalam kepengurusan lembaga-lembaga desa, dan hanya pada kelembagaan kesehatan dan ekonomi (Posyandu dan SPP) yang menjadi domain aktivitas perempuan.

Hal ini terlihat dari adanya pandangan laki-laki bahwa perempuan relatif memiliki kegiatan dalam membantu suaminya dalam kegiatan menghasilkan pendapatan rumah tangga, latar belakang pendidikan yang rendah, yaitu tidak lulus SD, sehingga menjadikan perempuan rentan dan belum dapat menyuarakan pendapatnya untuk kepentingan di tingkat desa. Perempuan juga dipandang laki-laki sebagai pribadi yang tidak boleh pulang terlalu malam dan fisiknya pun lemah. Ditambah dengan transportasi yang kurang mendukung di desa ini, jarak jauh dan penerangan minim menyebabkan kondisi yang aman adalah agar perempuan di rumah setelah membantu suaminya bekerja. Hal ini merupakan upaya agar menjauhkan perempuan dari kemungkinan melakukan pembicaraan mengenai orang lain yang belum tentu kebenarannya (gosip) dan selingkuh.

Dengan demikian maka dalam kurang setuju perempuan terlibat dalam kegiatan musrenbang atau program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau ikut Musrenbang namun hanya berkontribusi terkait masalah perempuan, seperti Posyandu dan PKK, dan perempuan lebih banyak membantu memasak untuk keperluan konsumsi rapat. Sejalan dengan pemikiran tersebut selain SPP, dalam struktur organisasi desa, BPD dan LPM, perempuan tidak dilibatkan sebagai anggotanya.

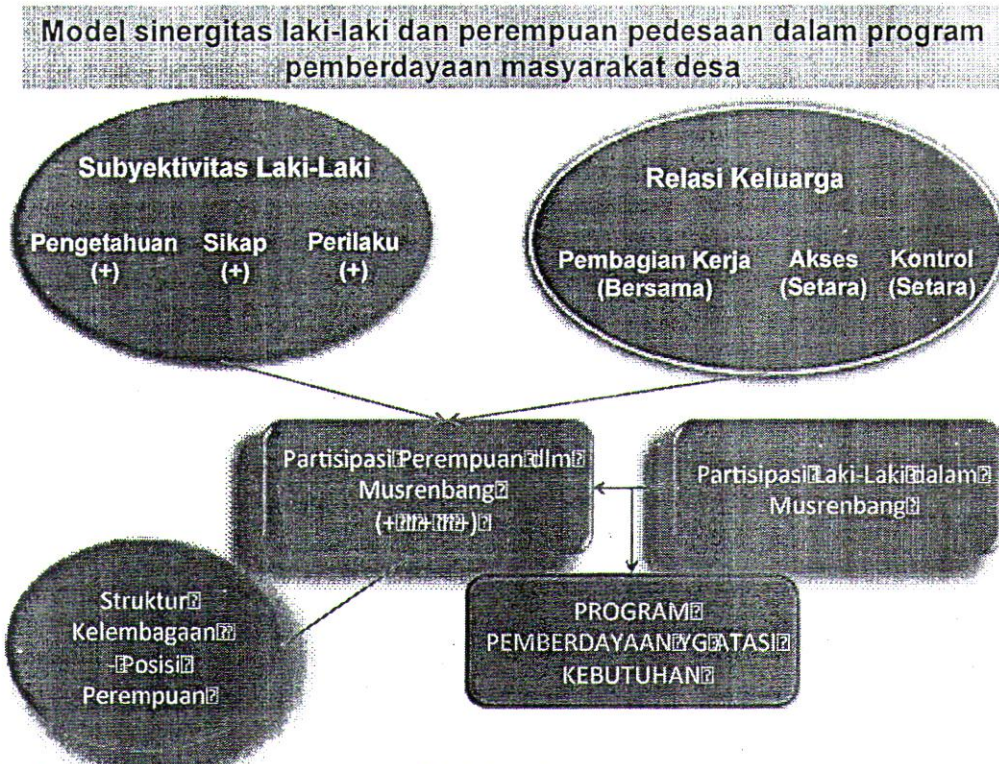
## **BAB VIII. USULAN MODEL SINERGITAS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Keberhasilan program pembangunan yang dapat memberdayakan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan. Subordinasi perempuan dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan Musrenbangdes, akan menghambat kesempatan untuk melaksanakan prinsip demokrasi dalam masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi dan menghambat pencapaian kesetaraan gender. Oleh karena itulah diperlukan partisipasi laki-laki dalam mendukung peran



publik perempuan dalam pembangunan, khususnya program pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat tiga faktor utama yang dapat menentukan partisipasi perempuan dalam ranah publik pembangunan, yaitu adanya pemahaman subyektivitas laki-laki dalam mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan, relasi gender dalam keluarga, dan struktur kelembagaan pembangunan, seperti tersaji pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Sinergitas Laki-laki dan Perempuan Pedesaan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Faktor subyektivitas laki-laki dalam mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan perilaku laki-laki terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan. Semakin positif pengetahuan, sikap dan perilaku laki-laki terhadap partisipasi perempuan maka akan semakin mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Faktor relasi gender dalam keluarga dipengaruhi oleh pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, akses dan kontrol laki-laki dan perempuan (anggota keluarga) terhadap sumberdaya dan manfaat dalam pembangunan. Semakin adanya kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dalam relasi keluarga maka semakin mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Faktor struktur dan kelembagaan pembangunan desa dipengaruhi oleh posisi perempuan dalam struktur organisasi pembangunan desa dan pengembangan aturan kelembagaan pembangunan desa yang responsif



gender. Semakin mengembangkan struktur organisasi dan kelembagaan pembangunan desa yang responsif gender maka semakin mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan pembangunan merupakan bagian dari hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan pada upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini akan menghasilkan program pemberdayaan masyarakat desa yang mampu menyeimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Selanjutnya, secara rinci faktor-faktor subyektivitas laki-laki yang mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan, adalah:

1. Pengetahuan laki-laki tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, disebut sebagai Modal Pengetahuan, mendorong laki-laki untuk membuka mind-set sebagai pemimpin keluarga, penting mengelola sumberdaya keluarga (pembagian kerja), membuka akses dan mengambil keputusan (kontrol) atas sumberdaya dan manfaat dalam pembangunan secara setara antara laki-laki dan perempuan.
2. Sikap laki-laki tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, disebut sebagai Modal Nurani, yaitu mengembangkan sikap positif sebagai mitra bersama perempuan (menjadi khalifah, rahmatan lil alamin) dalam pembangunan, kemauan bekerjasama (team work).
3. Perilaku laki-laki dalam mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan, disebut sebagai Modal Materi (sosial), yaitu mendorong laki-laki sebagai pemimpin (tokoh) lokal untuk mengakui hak perempuan sebagai warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, serta mengakui posisi yang setara dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan akan bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat (laki-laki dan perempuan).

## **BAB IX. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Penelitian untuk menguatkan peran publik perempuan yang sudah dilakukan dengan melihat partisipasi laki-laki dalam mendukung partisipasi perempuan menyimpulkan bahwa sudah adanya laki-laki (aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat) yang berupaya memenuhi jumlah kuota 30 persen perempuan dalam musrenbangdes, namun masih bersifat normatif. Partisipasi laki-laki dalam mendukung peran perempuan dalam pembangunan masih sangat terbatas di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dalam program-program pembangunan, partisipasi laki-laki masih dominan dalam keseluruhan tahap (perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi), sementara perempuan sudah dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, namun belum dilibatkan dalam evaluasi program.



Adanya tiga faktor utama dapat menguatkan peran publik perempuan yaitu adanya pemahaman subyektivitas laki-laki dalam mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan, relasi gender dalam keluarga, dan struktur kelembagaan pembangunan. Semakin positif pengetahuan, sikap dan perilaku laki-laki terhadap partisipasi perempuan; maka akan semakin mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan. Semakin adanya kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dalam relasi keluarga maka semakin mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan. Semakin mengembangkan struktur organisasi dan kelembagaan pembangunan desa yang responsif gender maka semakin mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Dengan begitu maka upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan semakin terpenuhi dan akan menghasilkan program pemberdayaan masyarakat desa yang mampu menyeimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

### **Rekomendasi**

Strategi untuk menguatkan peran publik perempuan dengan pendekatan peningkatan partisipasi laki-laki dalam mendukung peran perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat desa, bertumpu pada tiga aras, yaitu: (1) peningkatan kapasitas laki-laki itu sendiri (pengetahuan, sikap, perilaku) dalam mendukung partisipasi perempuan, yang dapat dilakukan melalui Tokoh Masyarakat Lokal (Laki-laki dan Perempuan); (2) peningkatan partisipasi kelembagaan desa (pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK); dan (3) peningkatan kapasitas aktor pemerintahan desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Jurnal of the American Institute Planners.
- Cohen, Uphoff. 1977. *Rural Development Participation*. Cornel University. New York.
- BAPEDA. 2013. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013. Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
- KPPPA. 2013. *Pembangunan Manusia berbasis Gender Tahun 2013*. Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik
- Nasdian, FT. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Pustaka Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Nasution, Zulkarnaen. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologis*. UMM Press. Malang.
- WHO, 2014, *Knowledge, attitudes, and practices (KAP) surveys during cholera vaccination campaigns: Guidance for Oral Cholera Vaccine Stockpile Campaigns*, Working group on Monitoring & Evaluation diunduh dari <https://www.google.co.id/>